

IMPLEMENTASI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING DI DESA SUNGSUM KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

Marsela¹, Agus Surya Dharma², M. Arsyad³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: sela11marsela@gmail.com

ABSTRAK

Stunting menjadi ancaman yang sangat serius bagi anak-anak maka dari itu perlu adanya penanganan dalam mengatasinya. Pada Desa Sungsum memiliki angka stunting tertinggi sekecamatan Tebing Tinggi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi intervensi penurunan stunting di Desa Sungsum Kecamatan tebing Tinggi Kabupaten Balangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi intervensi penurunan stunting. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Informan berjumlah 10 orang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih belum terlaksana dengan optimal. dilihat dari aspek pendidikan yang rendah dan rendahnya faktor ekonomi, pola Asuh anak yang masih mengikuti adat dan budaya zaman dulu, kurangnya koordinasi dari kepala Desa, sumber daya manusianya yang belum mencukupi, ketidakcukupan dana dalam penganggaran percepatan penurunan, Kemampuan para kader posyandu kurang maksimal. Adapun yang cukup optimal, dapat dilihat dari banyaknya antusias dari penerima program dalam mengikuti kegiatan posyandu yang diadakan setiap bulan, kerja sama yang baik antar instansi dan kelompok, struktur birokrasi yang sudah sesuai, hubungan yang baik dengan kelompok sasaran, fasilitas yang sudah cukup dan memadai. Saran kepada pihak pengelola agar dapat mengoptimalkan anggaran dana, menambah jumlah kader, dan mengadakan pelatihan untuk para kader posyandu, kepada petugas agar dapat memberikan sosialisasi terkait masalah stunting.

Kata Kunci : Implementasi, Stunting, Intervensi

ABSTRACT

Stunting is a very serious threat to children, therefore it is necessary to handle it. In Sungsum Village, which has the highest stunting rate in Tebing Tinggi District, this study aims to determine the implementation of stunting reduction interventions in Sungsum Village, Tebing Tinggi District, Balangan Regency and the factors that influence the implementation of stunting reduction interventions. This study uses a qualitative research method with a descriptive-qualitative type. There were 10 informants. The results of the study indicate that it has not been implemented optimally. The implementation of stunting reduction acceleration that has not been optimal is seen from the low education aspect and low economic factors, childcare patterns that still follow ancient customs and cultures, lack of coordination from the village head, inadequate human resources, insufficient funds in budgeting for acceleration reduction, and the ability of the integrated health post cadres which is still less than optimal. As for what is quite optimal, it can be seen from the enthusiasm of program recipients in participating in integrated health post activities held every month, good cooperation between agencies and groups, an appropriate bureaucratic structure, good relations with target groups, and sufficient and adequate facilities. Suggestions to the management to optimize the budget, increase the number of cadres, and hold training for integrated health post cadres, to officers so that they can provide socialization regarding stunting problems..

Keywords: Implementation, Stunting, intervention

PENDAHULUAN

Dampak *stunting* pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya. Selain itu, juga berdampak pada perkembangan kognitif dikarenakan terganggunya perkembangan otak sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak. Sedangkan untuk jangka panjang, *stunting* akan menyebabkan anak menjadi rentan terjangkit penyakit seperti penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas di usia tua. Selain itu, dampak jangka panjang bagi anak yang menderita *stunting* adalah berkaitan dengan kualitas SDM suatu negara. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Jika *stunting* tidak segera diatasi hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan kualitas SDM di masa yang akan datang. Penyebab utama *stunting* diantaranya, asupan gizi dan nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu mengalami *stunting*. Namun anak yang mengidap kondisi ini pasti berperawakan pendek. Anak dengan asupan gizi terbatas sejak kecil dan telah berlangsung lama berisiko mengalami pertumbuhan yang terhambat. Menurut WHO, suatu negara dikatakan memiliki masalah *stunting* bila kasusnya mencapai angka di atas 20%. Sementara, di Indonesia, berdasarkan data Kemenkes pada tahun 2021, kasus balita *stunting* di Indonesia sebanyak 24,4% sehingga termasuk dalam masalah yang perlu ditangani.

Oleh karena itu sesuai dengan arahan presiden Republik Indonesia terhadap percepatan penurunan *stunting* di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Hal ini menjadi fokus utama Presiden, karena semakin banyak kasus *stunting* yang terjadi di Indonesia. Penyebab *stunting* adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun. *Stunting* akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya.

Upaya penurunan *stunting* dilakukan melalui 2 intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang berlangsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan.

Sementara itu, intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung yang mempengaruhi kejadian stunting, misalnya perbaikan pola asuh, pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana air bersih dan jamban yang sehat.

Untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor, serta kapasitas untuk melaksanakan penurunan *stunting* memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang harus dimulai dari pemenuhan prasyarat pendukung. Pemerintah Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan diberikan kesempatan untuk berinovasi untuk menambahkan kegiatan intervensi efektif lainnya berdasarkan pengalaman dan praktik baik yang telah dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota dengan fokus pada penurunan stunting.

Berdasarkan data e-PPBGM bulan Mei 2023, Kabupaten Balangan tercatat sebagai kabupaten dengan kasus *stunting* terbanyak dan menempati pada posisi ke-6 dari 13 kabupaten di Kalimantan Selatan. Di Kabupaten Balangan jumlah Baduta (0-23 bulan) yang datang ke posyandu dan ditimbang tercatat sebanyak 2903 atau 81,59% dan di peroleh data Baduta 13,64% yang mengalami *Stunting*. (*Sumber Data: Data e-PPBGM Mei 2023*).

Penanganan *Stunting* dilakukan dengan intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik dilakukan pada sasaran ibu hamil dan anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Sedangkan sasaran intervensi sensitif adalah masyarakat umum yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Misalnya perbaikan pola asuh, pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana air bersih dan jamban yang sehat.

Maka dari itu sesuai dengan PERBUP BALANGAN No 17 Tahun 2022 tentang pencegahan *stunting* pada pasal 22 ayat 1 menyatakan Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penurunan stunting di daerah kepada perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan. Dalam pasal 22 ayat 4 juga dijelaskan dalam penurunan stunting para tim koordinasi bertugas melakukan koordinasi dan komunikasi, mengkaji dan menganalisa permasalahan stunting, merencanakan tujuan sasaran dan program penurunan stunting, melaksanakan mapping peran lintas sektor terkait penurunan stunting, melaksanakan dan mengalokasikan program penurunan stunting, monitoring, memberikan sosialisasi, memberikan rekomendasi kepada bupati, dan menyampaikan laporan pada bupati.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, atau Pemda Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh

pemerintah Pusat, Pemda Provinsi, ataupun Pemda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal, desa bisa menyelenggarakan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang berskala desa melalui sinergitas dengan sektor penyedia layanan.

Upaya penanganan *stunting* sudah menjadi prioritas nasional, sangat memungkinkan bagi desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan penanganan *stunting* berskala desa. Dengan adanya Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), desa dapat memanfaatkan dana ini untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan melalui mekanisme perencanaan desa.

Rujukan belanja desa untuk penanganan *stunting* diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kemudian Aturan terbaru yang berlaku adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 antara lain menyebutkan bahwa “Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa adalah Pencegahan *Stunting* untuk mewujudkan Desa Sehat dan Sejahtera”.

Desa sungsum termasuk menjadi salah satu desa di kecamatan Tebing Tinggi yang masuk ke dalam fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2024 dan menempati posisi pertama yang mempunyai jumlah anak terbanyak yang mengalami *stunting* tertinggi di Kecamatan Tebing Tinggi dengan total 16 orang anak pada tahun 2023. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana Implementasi percepatan penurunan *stunting* di Desa Sungsum. (*Sumber Data: Jumlah Angka Stunting Kecamatan Tebing Tinggi 2023*)

Dalam kegiatan rutin dalam penanganan *stunting* di Desa Sungsum di adakan posyandu balita rutin setiap bulannya, dan untuk posyandu remaja baru akan kembali dilaksanakan bulan April, karena dulu sempat terhenti karena pergantian kepala desa dan jajarannya. Selain posyandu balita dan posyandu remaja pada Desa Sungsum juga di adakan kegiatan seperti kelas ibu hamil, pemberian PMT, imunisasi, monitoring pertumbuhan, pembagian sufur bagi balita dan ibu hamil sebagai perbaikan nutrisi, penyuluhan dan pendampingan keluarga. Dan untuk kasus balita yang mengalami *stunting* penanganan yang diberikan dengan menambah porsi PMT pada saat posyandu dilaksanakan hal tersebut

dilakukan berulang-ulang sampai si anak terbebas dari *Stunting*. (Sumber data : Hasil Wawancara dengan Kader Posyandu).

Dari hasil observasi penulis ditemukan beberapa fenomena masalah,yaitu:

1. Tingginya angka stunting di Desa Sungsum yang diakibatkan oleh lingkungan social yang belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari rendahnya pendapatan yang didapatkan oleh orangtua, pendidikan yang rendah dari orangtua yang menyebabkan orangtua tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang bagaimana pola hidup sehat yang baik, selain itu pola asuh masyarakat Desa Sungsum masih kental dengan budaya zaman dulu.
2. Kurangnya karakteristik dan kemampuan dari agen pelaksana dalam menanggulangi anak yang terkena stunting, karena tidak adanya program khusus dari desa untuk penanganan anak yang terkena stunting di desa Sungsum.
3. Kurangnya kualitas Sumber daya manusia para kader posyandu balita dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai salah satu garda terdepan penanganan stunting. Dan juga masih kurangnya jumlah tenaga ahli gizi untuk memberikan pelayanan kepada para masyarakat

METODE

Dalah hal penulis melakukan Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis terdiri dari adwawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang diambil adalah informan melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 10. Setelah data terkumpul kemudain dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penerikan kesimpulan

PEMBAHASAN

1. Kondisi Lingkungan

a. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah tempat berlangsungnya kegiatan masyarakat dalam sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa lingkungan social belum cukup baik karena tingkat pendapatan yang rendah sangat berkaitan dengan kejadian stunting, karena status ekonomi yang rendah memiliki pengaruh dominan terhadap kejadian kurus dan pendek pada anak. Orangtua dengan pendapatan yang berkecukupan memiliki kemampuan untuk menyediakan makanan yang bergizi dan bervariasi. Dengan status ekonomi yang baik juga akan mendapatkan satus pelayanan kesehatan yang baik, sedangkan status ekonomi yang rendah cenderung mengonsumsi makanan dan minuman dalam kualitas yang

kurang baik dan kurang bervariasi. Tingkat pendidikan juga sangat mempengaruhi dalam penyampaian informasi, karena pendidikan mereka rata-rata hanya lulusan SD dan pengetahuan mereka yang kurang sehingga berpengaruh dalam penyampaian mengenai gizi yang sesuai, juga dalam kurangnya memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitarnya, dan juga ketidak tepatan dalam pola asuh.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori G.Shabbir Cheema dan Denis A. Rondinelli dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 155-158) bahwa keadaan lingkungan sosial adalah tempat tinggal kelompok masyarakat.

b. Lingkungan Budaya

Keadaan lingkungan budaya segala kebiasaan atau adat yang dianut dimasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa lingkungan budaya di Desa sungsum belum cukup baik karena praktik pemberian makan pada balita yang masih erat kaitannya dengan kebiasaan dan kebudayaan masyarakat zaman dahulu yang minim pengetahuan mengenai bagaimana pola asuh yang baik terhadap anak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori G.Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 155-158) bahwa keadaan budaya sangat mempengaruhi dan menentukan sebuah keberhasilan program.

c. Keterlibatan penerima program

Keterlibatan penerima program adalah partisipasi dan kehadiran dari masyarakat terhadap kebijakan dalam program yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan penerima program sudah baik, karena telah banyak masyarakat yang mau terlibat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi percepatan penurunan stunting di Desa Sungsum sudah baik karena dari keterlibatan penerima program dari partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan telah menunjang keberhasilan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Desa Sungsum.

Hal tersebut sesuai dengan teori G.Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondenelli dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2026:155-158) bahwa keterlibatan penerima program penting karena tanpa adanya partisipasi program tidak dapat optimal dijalankan karena tidak mencapai sasaran.

2. Hubungan Antar Organisasi

a. Koordinasi

Koordinasi adalah kerjasama atau hubungan berbagai pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi di Desa Sungsum belum cukup baik. Karena kurangnya koordinasi dari kepala Desa Sungsum ke para

bawahannya, Sehingga komunikasi antar bawahan dan atasan tidak terjalin dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat diwujudkan dengan optimal. dan akhirnya berdampak pada tidak adanya arahan dari kepala desa untuk membuat suatu program khusus untuk menangani anak yang terkena stunting di Desa Sungsum.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori G.Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:155-158) bahwa koordinasi merupakan mekanisme yang sangat penting dalam titik program.

b. Kerjasama Antar Instansi

Kerja sama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga kelangsungan organisasi.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa kerjasamanya sudah baik dapat dilihat dengan bantuan yang diberikan oleh dinas social dalam salah satu bentuk dari aksinya dalam percepatan penurunan stunting. Kerja sama antar pada kader dan pihak puskesmas pun sudah berjalan baik mereka gencar melakukan kegiatan-kegiatan untuk menurunkan kasus stunting di Desa Sungsum..

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikatan oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 155-158) bahwa kerjasama akan membentuk ikatann dan pertukran informasi yang efektif dalam program.

3. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Desa Sungsum dengan ketersediaan sumber daya manusia belum cukup baik dalam mendukung keberhasilan program penurunan stunting. Karena kurangnya jumlah kader posyandu balita dalam pelaksanaan posyandu balita yang pesertanya mencapai 99 orang dan tidak adanya kurang mencukupi dalam mendukung keberhasilan program penurunan stunting kurangnya tenaga gizi dan kurangnya jumlah kader posyandu balita.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikatan oleh G.Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 155-158) bahwa ketersediaan manusia merupakan penunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

b. Fasilitas

Fasilitas meliputi sarana dan prasarana yang diadakan untuk mendukung sebuah program.

Berdasarkan hasil wawancara, Observasi dan Dokumentasi dapat disimpulkan bahwa fasilitas di Desa Sungsum dalam mendukung keberhasilan program penurunan stunting di

Desa Sungsum sudah sangat baik dan memadai. Mulai dari adanya gedung posyandu yang sudah lengkap dengan area bermain anak, alat ukur timbangan berat dan tinggi anak yang sudah cukup, serta tersedianya poskesdes dan Paud.

Hal ini sesuai dengan teori G.Shabbir Chema dan Denis A. Rondinelli dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 155-158) Bahwa fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi.

c. Dana

Dana suatu sumber daya finansial yang dapat membantu kelancaran organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dana yang dianggarkan di Desa Sungsum belum tercukupi dengan baik. Karena mereka kekurangan dana untuk menangani penurunan stunting, sebut saja seperti halnya penyaluran susu formula yang kadang sering terlambat penyalurannya dan yang seharusnya satu bulan sekali jadi dianggarkan untuk tiga bulan sekali, jadi pemerintah desa sungsum harus lebih pandai-pandai dalam membagi dana untuk mengatasi permasalahan stunting ini jangan sampai hal ini terulang kembali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dari aspek dana di desa Sungsum belum cukup maksimal karena walaupun PMT yang diberikan pada saat posyandu sudah baik, tapi hal itu hanya untuk pemenuhan gizi satu hari saja, bagaimana dengan hari selanjutnya, kalau saja susu sebagai PMT tambahan itu dapat selalu tersalurkan dalam setiap bulannya tentu hal ini akan dapat setidaknya sedikit menambah protein dan kalsium yang baik untuk pertumbuhan anak, apalagi anak yang terkena stunting yang memerlukan gizi yang lebih.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh G.Shabbir Cheema dan Denis A.Rondinelli dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 155-158) bahwa kecukupan anggaran/dana sangat mempengaruhi dalam kegiatan penurunan stunting.

4. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

a. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi adalah acuan pembagian tugas dan wewenang.

Berdasarkan hasil wawancara dan Observasi dapat disimpulkan bahwa aspek struktur birokrasi yang sudah ada sudah baik dalam mendukung program penurunan stunting. Semua Implementator telah mengerjakan topuksinya sesuai dengan kewenangan yang dibidangi terlihat dari struktur birokrasi sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan kapasitas ilmu yang dimiliki pada setiap bidang sesuai dengan prosedur yang diarahkan.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikatan oleh G.Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:155-158) bahwa struktur birokrasi yang bertugas penting agar suatu program dapat berjalan terarah dan teratur.

b. Kemampuan

Kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana adalah sebuah keahlian yang sangat menunjang dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dan Observasi dapat disimpulkan bahwa kemampuan dalam memberikan pelayanan kesehatan belum cukup baik hal ini dapat kita simpulkan dari kemampuan para kader posyandu dalam melakukan kegiatan mengukur tinggi dan berat badan yang masih kaku dan belum terbiasa menggunakan alat-alat pengukur tinggi dan berat badan terutama untuk alat ukur yang digital.

Hal tersebut tidak sesuai dengan teori dari G.Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016:155-158) bahwa kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana akan membuat kemudahan dalam penyelesaian suatu program.

c. Hubungan kepada kelompok sasaran

Hubungan menjadi dasar hal dan keadaan saling mempengaruhi dan bergantung satu sama lain. Sebuah interaksi yang terjalin kepada kelompok sasaran sangat diperlukan demi terciptanya hubungan yang baik untuk mencapai keberhasilan sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa hubungan kepada kelompok sasaran di Desa Sungsum sudah berjalan baik. Menurut observasi penulis sejauh ini interaksi masyarakat dengan kader maupun dengan para petugas kesehatan di puskesmas terjalin dengan baik. Para tim pelaksana selalu bertegur sapa dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran, para kader juga memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Sehingga respond masyarakat sangat baik terhadap pelayanan yang mereka dapat pada posyandu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan kepada kelompok sasaran di Desa sungsum sudah baik karena sapaan dan pelayanan yang ramah dari bidan desa, kader, tenaga gizi dan pihak lain yang terlibat.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikatakan oleh G.Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam (Rahayu Kusuma Dewi, 2016: 155-158) bahwa hubungan kepada kelompok sasaran sangat penting agar tercipta koordinasi yang baik dalam pencapaian tujuan program.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Di Desa Sungsum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan (Studi kasus Perbub No 17 Tahun 2022 Tentang Penurunan Stunting), sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

Pertama, tingginya antusias keterlibatan penerima program. Kedua, terciptanya hubungan yang baik antara Petugas dengan kelompok sasaran. Ketiga, fasilitas yang sudah memadai.

b. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat yang terdiri dari, yaitu: Pertama, pendidikan yang rendah dan rendahnya faktor ekonomi. Kedua, pola Asuh anak yang masih mengikuti adat dan budaya zaman dulu. Ketiga, kurangnya koordinasi dari Kepala Desa. Keempat, sumber daya manusia yang belum

memadai. Kelima, kurangnya jumlah dana dalam penyelenggaraan program percepatan penurunan stunting. Keenam, kurangnya pelatihan untuk para kader posyandu balita.

SIMPULAN

Implementasi Intervensi Penurunan Stunting Di Desa Sungsum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten belum cukup efektif, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari aspek yang pertama, pada sub variabel kondisi lingkungan mengenai indikator lingkungan social belum optimal karena rendahnya pendidikan dan rendahnya faktor ekonomi orangtua karena sebagian besar masyarakat di Desa Sungsum berprofesi sebagai penyadap karet dan petani yang tentunya penghasilan mereka bergantung pada baik buruknya cuaca hal ini tentunya menyebabkan orangtua jadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dan kelengkapan gizi anak. Kedua, pada sub variabel kondisi lingkungan mengenai indikator Lingkungan budaya masih belum optimal karena Pola Asuh orangtua terhadap anaknya yang masih terpaku dan selalu mengikuti adat dan budaya zaman dulu, yakni masih banyaknya orangtua yang salah dalam memberi makan yang tidak sesuai dengan umur, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, dan kebersihan. Ketiga, pada sub variabel hubungan antar organisasi mengenai indikator koordinasi belum optimal karena, kurangnya koordinasi dari kepala desa dalam menentukan upaya apa yang harus dilakukan guna mengatasi kasus stunting yang terjadi di desa sungsum. Keempat, pada sub variabel sumber daya mengenai indikator Indikator sumber daya manusianya yang masih kurang optimal karena, kurangnya tenaga kesehatan dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat. Kelima, pada sub variabel sumber daya pada indikator dana belum optimal karena Ketidak cukupan dana dalam penganggaran percepatan penurunan stunting, Karena belum di lakukan penganggaran dengan baik. Keenam, pada sub variabel karakteristik dan kemampuan agenda pelaksana dalam indikator kemampuan juga belum optimal karena hampir semua kader posyandu adalah kader baru, jadi kemampuan dari kader posyandu masih kurang mencukupi.

Adapun yang cukup optimal, dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, pada sub variabel kondisi lingkungan mengenai indikator keterlibatan penerima program sudah optimal karena banyaknya antusias dari penerima program dalam mengikuti kegiatan yang diadakan terutama pada kegiatan posyandu tiap bulan. Kedua, pada sub variabel hubungan antar organisasi pada indikator kerja sama antar instansi sudah cukup optimal karena Kerja sama yang terjalin sudah cukup baik dengan instansi lain yang bersangkutan. Ketiga, pada sub variabel sumber daya pada indikator fasilitas sudah optimal karena sarana dan prasarannya sudah tercukupi. Keempat pada sub variabel karakteristik dan kemampuan agenda pelaksana pada indikator struktur birokrasi sudah cukup optimal karena, mereka melakukan tugas-tugas mereka sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kelima, pada sub variabel karakteristik dan kemampuan agenda pelaksana pada indikator

hubungan kepada kelompok sasaran sudah optimal karena interaksi baik yang tercipta antara petugas dan kelompok sasaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Intervensi Penurunan Stunting Di Desa Sungsum Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, memiliki faktor pendorong sebagai berikut: Pertama, tingginya antusias keterlibatan penerima program. Kedua, terciptanya hubungan yang baik antara Petugas dengan kelompok sasaran. Ketiga, fasilitas yang sudah memadai. Faktor Penghambat yang terdiri dari, yaitu: Pertama, pendidikan yang rendah dan rendahnya faktor ekonomi. Kedua, pola Asuh anak yang masih mengikuti adat dan budaya zaman dulu. Ketiga, kurangnya koordinasi dari Kepala Desa. Keempat, sumber daya manusia yang belum memadai. Kelima, kurangnya jumlah dana dalam penyelenggaraan program percepatan penurunan stunting. Keenam, kurangnya pelatihan untuk para kader posyandu balita.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jakarta.
- Anonim, 2021. PERMENDES PDPT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yangbersumber dari APBN.
- Anonim, Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Stunting
- Anggara, S. (2015b) 'Metode Penelitian Administrasi', 53(9), pp. 1689–1699.
- Agustino, Leo. 2019. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta , cv
- Ahmad Saebani, Beni, Afifudin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv PUSTAKA SETIA
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta CV
- STIA AMUNTAI (2022) 'Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik', *Pedoman Penyusunan Skripsi*.
- Siti Marwiyah. 2022. *Kebijakan Publik, Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).